**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dunia kini memasuki era globalisasi, dimana terjadinya transkulturasi dan pengembangan pada berbagai bidang yang memfasilitasi pertukaran budaya yang satu dengan yang lainnya. Globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas-batas internasional**.[[1]](#footnote-1)** Globalisasi terbentuk karena perkembangan komunikasi internasional yang terus maju dan berkembang hingga dimana negara-negara saling bergantung dan menghilangkan batas ruang dan waktu.

Terdapat beberapa aspek dalam globalisasi, yaitu globalisasi informasi dan komunikasi, globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi politik dan sebagainya. Globalisasi ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi ekonomi ini cenderung menuju liberalisme ekonomi, yaitu tidak adanya campur tangan pemerintah dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Liberalisme ekonomi ini mendorong adanya liberalisasi perdagangan dengan adanya perdagangan bebas, yaitu konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Dalam politik internasional terdapat beberapa persoalan penting yaitu hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi, pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga, dan sifat luasnya globalisasi ekonomi**.[[2]](#footnote-2)** Dalam hal ini masalah disparitas antara negara maju dengan negara dunia ketiga menjadi agenda ekonomi politik internasional semakin penting. Dalam konteks tersebut kemudian liberalisme ekonomi yang di implementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral dengan negara maju, menjadi formula bagi negara berkembang dalam peningkatan kapabilitas perekonomian**.[[3]](#footnote-3)**

Negara berkembang yang sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Latin dan sebagian besar negara berkembang lainnya saat ini seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan sedang mencoba menjalankan standar ekonomi nasionalnya seperti negara maju**.[[4]](#footnote-4)** Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk ke dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk menyajajarkan diri dengan negara-negara lain yang telah maju. Salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan jepang dalam bentuk IJEPA (*Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement*).

Semua negara-negara di dunia ikut andil dalam mendorong liberalisasi perdagangan dengan melakukan kerjasama perdagangan bebas baik secara bilateral maupun regional. Secara regional dapat dilakukan dalam skema *Free Trade Area* (FTA). Sedangkan secara bilateral dapat dilakukan dengan *Economic Partnership Agreement* (EPA).

EPA adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan**.[[5]](#footnote-5)** EPA merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan pada tahun 2000 dan hingga kini Jepang telah melakukan kerjasama ini dengan delapan negara, yaitu Mexico, Chile, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Indonesia**.[[6]](#footnote-6)**

Selama lima dekade terakhir, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik terutama dalam bidang ekonomi. Sejak menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta, kedua negara mengawali hubungan ekonomi dengan kesepakatan damai pembayaran ganti rugi akibat perang. Perjanjian damai membuat Jepang harus memberikan ganti rugi kepada Indonesia sebesar US$ 223, 08 juta atau setara dengan ¥ 80, 3 milyar kurs saat itu. Selain perjanjian tersebut juga mensyaratkan Jepang harus menghapus hutang Indonesia sebelumnya sejumlah US$ 176, 92 juta, diikuti dengan bantuan ekonomi sebesar US$ 400 juta**.[[7]](#footnote-7)**

Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Jepang didasari oleh *Treaty on Amity Relations and Commerce* yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961. Indonesia diwakili oleh Menteri luar Negeri, Dr. H. Soebandrio. Persetujuan lainnya adalah : Treaty on Air Service 23 Januari 1962 , *Agreement in Science and Technoogy cooperation* 12 Januari 1981, dan *Agreement on the Avoidance of Doubi Taxation* 3 Maret 1982**.[[8]](#footnote-8)**

Komitmen Jepang ini dibuktikan dengan memberikan bantuan pemulihan ekonomi, memainkan peran kunci dalam mengatur penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia melalui IGGI dan mengambil bagian penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui paket ODA (*Official Development Assistance*). Selama periode 1967-1980, Jepang merupakan investor terbesar di sektor-sektor *non*-energi di Indonesia dalam pemulihan ekonomi dan menguasai 41% investasi modal asing yang telah disetujui oleh pemerintah**.[[9]](#footnote-9)**

Hubungan kedua negara juga memiliki interdepedensi terhadap satu sama lain. Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra ekspor dan impor terbesar dan Indonesia telah merasakan *surplus* yang besar dalam hubungan perdagangannya dengan Jepang**.[[10]](#footnote-10)** Sementara bagi Jepang, Indonesia memiliki nilai yang sangat penting terutama sebagai pemasok sumber daya energi untuk industri-industri di Jepang. Selaman ini Jepang menggantungkan pasokan energinya dari Indonesia dengan total 24% dari keseluruhan gas Jepang**.[[11]](#footnote-11)**

Peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang semakin mendapat momentumnya pada tahun 2007. Pada tanggal 20 Agustus 2007, Indonesia dan Jepang Menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/*IJEPA). Pembentukan EPA sendiri lahir berawal ketika proposal pembentukan FTA yang ditawarkan oleh PM Jepang Junichiro koizumi kepada Presiden Megawati yang sedang berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003**.[[12]](#footnote-12)**

Dalam *Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement* antara Indonesia dan Jepang tersebut, yang diumumkan pada tanggal 8 September 2003 Megawati dan Koizumi sepakat untuk menugaskan pejabat di kedua pemerintahan untuk melakukan pertemuan pendahuluan mendiskusikan kemungkinan pembentukan EPA antara Indonesia dan Jepang**.[[13]](#footnote-13)**

Pada tanggal 8 September 2003 pertemuan pendahuluan diadakan di Tokyo, Jepang dan di isi dengan pembahasan mengenai pandangan kedua negara mengenai FTA**.[[14]](#footnote-14)** Pada tanggal 6 November 2004, Kepala Nippon Kaidanren, Hiroshi Okuda mengunjungi Presiden SBY untuk meneruskan kembali pembicaraan mengenai FTA Indonesia dan Jepang, menurut Okuda, dalam pertemuan tersebut SBY menyampaikan komitmennya untuk meneruskan pembicaraan mengenai kerjasama FTA yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan Megawati**.[[15]](#footnote-15)** Sebelumnya inisiatif Jepang untuk membentuk EPA dengan Indonesia terkait dengan pembentukan EPA dengan ASEAN. Hal ini ditegaskan oleh PM Jepang Koizumi pada saat KTT ASEAN-Jepang di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002, Koizumi menyatakan bahwa untuk dapat melakukan kerjasama FTA di Asia Tenggara harus dilakukan dengan dua level (*two-level Approach*) yakni bilateral dan regional**.[[16]](#footnote-16)**

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2004 Menteri Ekonomi Jepang Soichi Nakagawa menemui Menko Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan baru yang merupakan lanjutan dari penawaran insentif investasi pengusaha Jepang yang disempaikan kepada Presiden SBY pada pertemuan sebelumnya**.[[17]](#footnote-17)** Keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2004, Nagawa menemui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan menyepakati untuk membuat kelompok studi bersama (*Joint Study Group/*JSG) yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan FTA, biaya dan keuntungan serta sektor-sektor apa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut**.[[18]](#footnote-18)**

Setelah tiga kali pertemuan JSG, kedua negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan ke tingkat negosiasi. Namun, baik Jepang dan Indonesia mempunyai resistensi yang tinggi terhadap liberalisasi di sector-sektor tertentu. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya negosiasi dan memakan banyak waktu. Setelah dua tahun bernegosiasi, akhirnya kedua negara membentuk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) sebagai kesepatan kemitraan ekonomi yang mencakup pembentukan FTA, kesepakatan investasi, kerjasama di bidang energi dan lainnya.

Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), yang kemudian diikuti dengan seri perundingan/negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006. Pada akhir negosiasi tanggal 24 November 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator*, Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yabunaka menandatangani *Record of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin. Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dalam kerangka *wrapup meeting.* Hasil negosiasi tersebut berupa *Record of Discussion* yang kemudian disepakati oleh kedua *Chief Negotiator*, yaitu Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Masaharu Konho, Wakil Menteri Luar Negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *Pending issue* dan merapikan *draft* teks dari sisi bahasa dan hukum**.[[19]](#footnote-19)**

Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2008**.[[20]](#footnote-20)**

Indonesia membuka akses pasarnya sekitar 93 % dari 11. 163 *tarif line*-nya bagi produk Jepang, dengan 58 % dari *tarif line* tersebut langsung berlaku sejak perjanjian dimulai pada tanggal 1 Juli 2008, sedangkan Jepang, membuka akses pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90% dari *tarif line*-nya, dengan 80% *tarif line* tersebut langsung berlaku sejak perjanjian dimulai. Indonesia sendiri memandang IJEPA sebagai bentuk dari suatu kerjasama formal dengan Jepang yang tujuannya untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Kerjasama IJEPA sendiri dibangun tiga pilar utama yaitu, Fasilitas Perdagangan, Liberalisasi dan Kerjasama/*Cooperation***.[[21]](#footnote-21)**

Kesepakatan perdagangan bebas atau (*Free Trade* Area) dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra adalah IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*). Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan. Penandatanganan perjanjian tersebut telah dilakukan oleh baik kepala negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta.

Dalam program perindustrian atau MIDEC (*Manufactur Industry Development* Center) IJEPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan. Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi : fast–track, normal track, dan pengecualian, dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri domestik. Untuk produk klasifikasi fast-track, persentase tertentu dari total pos tarif akan diturunkan ke 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Bagi produk klasifikasi *normal-track*, tarif diturunkan menjadi 0 % pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJEPA bagi persentase tertentu dari total pos tarif. Di samping konsesi tarif tersebut, diatur pula suatu skema konsesi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan kompensasinya melalui fasilitasi pusat pengembangan industri manufaktur.

Neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2010 mencatat surplus bagi Indonesia sebesar US$ 8,7 miliar. Angka *surplus* ini merupakan peningkatan sebesar 8,9 % dibandingkan *surplus* perdagangan tahun 2009 yang tercatat sebesar US$ 9,6 miliar. Pada tahun 2010 nilai perdagangan kedua negara secara keseluruhan telah mencapai angka US$ 42,3 miliar. Indonesia mengekspor ke Jepang sebesar US$ 25,5 miliar dan mengimpor dari Jepang sebesar US$ 16,8 miliar. Nilai total perdagangan tersebut merupakan kenaikan sebesar 45,6 % dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US$ 29 miliar. Sementara itu pada periode Januari-Oktober 2011, total perdagangan kedua negara telah berjumlah US$ 43,8 miliar atau naik 27 % dibanding periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US$ 34,4 miliar. Nilai total perdagangan antar kedua negara menunjukkan kecenderungan positif, di mana rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir (2006-2010) tercatat sebesar 8,4 %.

Perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian keistimewaan tarif oleh kedua pihak. Dari pihak Indonesia, keistimewaan yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93 % dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor Jepang ke Indonesia dalam pos-pos tarif khusus tersebut telah mencakup 93 % dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekitar 35 % dari pos tarif akan diturunkan hingga 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi normal *track*, sekitar 58 % dari pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0 % dalam masa tiga hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7 % merupakan produk yang dikecualikan dari pos tarif IJEPA.

Jepang memberikan kepada Indonesia perlakuan khusus tarif di lebih dari 90 % dari pos tarif Jepang yang berjumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos- pos tarif tersebut mencakup 99 % dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Untuk produk klasifikasi fast-track, sekitar 80 % dari total pos tarif akan diturunkan ke 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Sementara itu, untuk produk-produk dalam klasifikasi normal *track* sekitar 10% dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0 % secara bertahap dalam waktu tiga hingga sepuluh tahun sejak berlakunya IJEPA. Sedangkan 10 % sisanya akan dikecualikan dari skema tarif IJEPA.

Di luar skema tarif preferensial terdapat skema khusus yang diperjanjikan antara Indonesia dan Jepang di mana skema semacam itu tidak ada dalam ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA. Indonesia bersedia memberikan fasilitas User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dengan imbalan fasilitas Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) dari Jepang.

Selain itu, IJ-EPA merupakan sebuah free trade agreement new-age yang terdiri dari tiga belas isu komprehensif dan bersifat World Trade Organization (WTO) plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah capacity building sebagai bagian dari partnership agreement. Tiga belas unsur dalam IJ-EPA meliputi 1) Trade in Goods, 2) Trade in Services, 3) Rules of Origin (ROO), 4) Investment, 5) Improvement of Business Confidence, 6) Movement of Natural Persons, 7) Energy and Mineral Resources, 8) Customs Procedures, 9) Intellectual Property Rights, 10) Competition Policy, 11) Technical Cooperation and Capacity Building, 12) General Provisions, dan 13) Government Procurement.

IJEPA sebagai salah satu bentuk FTA khusus telah berlangsung efektif hampir mencapai empat tahun, dan karenanya menarik untuk dikaji dampaknya sejauh ini bagi perekonomian Indonesia dan Jepang. Adapun tujuan dari penilaian dampak suatu FTA adalah untuk mengetahui apakah tujuan suatu FTA dapat dipenuhi. Salah satu bidang perjanjian yang penting untuk dievaluasi dampaknya atau perlu dilakukan penilaian dampak adalah bidang atau sektor perdagangan barang IJEPA.

Melihat pada perkembangan yang begitu pesat pada potensi Industri sampai sekarang ini, diiringi dengan adanya kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang Industri, maka penulis mencoba mengkaji serta menganalisa mengenai **“KERJASAMA EKONOMI *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pengamatan penulis diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan di atas yaitu, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dan motif terbentuknya kerjasama internasional antar negara?
2. Sejauhmana implementasi Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap perdagangan antara Indonesia-Jepang?
3. Apa keuntungan dan manfaat oleh kedua belah pihak dalam kerangka Kerjasama Indonesia–Japan Ekonomic Partnership Agreement (IJEPA) terutama bagi Indonesia?
4. Sejauhmana perkembangan industri di Indonesia pasca kerjasama dengan Jepang dalam konteks IJEPA?

**1. Pembatasan Masalah**

Mengingat penelitian ini sangat luas dan kompleks, maka penulis membatasi fokus pembahasannya dengan menitik beratkan pada **“Implikasinya terhadap pertumbuhan perindustrian di Indonesia melalui forum kerjasama *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJ–EPA) periode 2008 sampai 2012 dan keuntungannya di dalam negeri”.**

**2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan tingkat lanjut dari identifikasi masalah. Perumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini dimaksud agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Adapun perumusan masalah yang dapat ditulis berdasarkan pada pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Implikasi Kerjasama Ekonomi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)dan Pertumbuhannya Terhadap Perindustrian di Indonesia”?**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dapat dipertanggungjawaban dalam penulisannya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk memahami latar belakang dan motif terbentuknya kerjasama ekonomi antar negara.
2. Untuk mengetahui hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA.
3. Untuk mengetahui keuntungan dan manfaat oleh kedua belah pihak dalam kerangka Kerjasama Indonesia–Japan Ekonomic Partnership Agreement (IJEPA) terutama bagi Indonesia.
4. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan industri di Indonesia pasca kerjasama dengan Jepang dalam konteks IJEPA.

**2. Kegunaan Penelitian**

Dalam kegunaan penelitian, penulis tidak saja berharap terselesaikan tetapi hasil dari penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat-manfaat berikut:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.Ip)”.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna di dalam memberikan informasi lebih jauh lagi bagi penulis mengenai kondisi Industri di Indonesia.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam meningkatkan potensi Industri di Indonesia maupun di Jepang.
5. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangan dan kontribusi efektif bagi masyarakat mengenai kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA ini.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

1. **Kerangka Teoritis**

Untuk Mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema peneliti ini adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan sdengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam scope Hubungan Internasional.

Dewasa ini adanya masyarakat internasional yang saling mengadakan interaksi merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi dimana negara-negara di dunia adalah pelaku hubungan internasional.

Pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan umumnya diwarnai oleh tiga pola hubungan, yaitu kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar pelaku interaksi, baik itu *state actor* maupun *non-state actor.* Hal ini disebabkan karena adanya persamaan maupun perbedaan kepentingan di antara para pelaku hubungan tersebut. Pola-pola interaksi tersebut membuktikan bahwa setiap negara saling membutuhkan satu sama lain yang juga menunjukan adanya kempleksitas dan interaksinya dalam hubungan internasional. Adanya keinginan untuk melakukan kerja sama yang merupakan sebuah aktivitas diantara negara-negara dalam membentuk suatu hubungan baik secara bilateral maupun multilateral**.[[22]](#footnote-22)**

Hal diatas mengarahkan kita untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari hubungan internasional itu sendiri. Hubungan Internasional sendiri merupakan penjabaran dari :

**“Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, arah baru dari politik internasional, semua aspek social kehidupan manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri”.[[23]](#footnote-23)**

Dapat diartikan bahwa hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segenap kehidupan manusia.

Studi Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama sejak berakhirnya perang dunia ke II. Pada masa perang dunia ke I studi Hubungan Internasional pada umumnya yang menjadi pokok perhatian studi Hubungan Internasional adalah sejarah politik internasional dan perkembangan serta bekerjanya lembaga-lembaga internasional, kecenderungan ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa hal tersebut dapat membantu dan berguna bagi perdamaian dunia. Namun paska perang dunia ke II studi Hubungan Internasional mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara di dalam mengadakan hubungan yang satu dengan Negara yang lainnya.

Studi hubungan internasional dikembangkan untuk memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Pada dasarnya studi hubungan internasional bertujuan untuk mempelajari perilaku para aktor negara maupun non-negara dalam arena transaksi internasional. Perilaku para aktor tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya**.[[24]](#footnote-24)**

**K.J Holsti** berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah:

**“kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi itu atau tidak oleh pemerintahannya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau negara yang melalui interaksi dengan negara lain di mana interaksi tesebut dapat berbentuk hubungan antarpemerintah maupun negara. Hubungan diplomatik, persekutuan, aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman kekuatan militer, budaya,ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antar manusia yang tinggal di negara berbeda”.[[25]](#footnote-25)**

Perlu juga diperhatikan mengenai definisi dari kerjasama itu sendiri terutama dalam tulisan ini.

**“Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah dengan pihak Pemerintah Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka kerjasama internasional.”[[26]](#footnote-26)**

Karakteristik perilaku diantara aktor-aktor pada dasarnya akan mengarah pada pola umum yaitu konflik dan kerjasama. Kedua pola ini tercipta atas dua kepentingan masing-masing Negara. Jika terdapat dua kepentingan serta persinggungan diantara kedua Negara, hal ini dapat menimbulkan konflik. Sebaliknya, kerjasama dapat tercipta jika Negar-negara dapat memiliki kesamaan kepentingan nasionalnya maka akan melakukan kerjasama dengan Negara lain. Hal tersebut seperti yang dikumukakan oleh **Soerjono Soekanto :[[27]](#footnote-27)**

**“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri melalui kerjasama, dan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya suatu organisasi merupakan suatu fakta yang penting dalam kerjasama berguna.”**

Konsep Hubungan Internasional merupakan interaksi yang di dalamnya terdapat kajian politik, social, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor non negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpatisipasi dalam politik internasional dan penggunaan politik luar negeri dalam pencapaian kepentingan suatu negara. Dalam hal ini adapun pengertian Politik Luar Negeri adalah :

**“Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, ia merupakan bagian dari kebijakan nasiona dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan yang teah ditetapkan, khususnya untuk menghadapi kurun waktu yang sedang dihadapinya dan lazimnya disebut kepentingan nasional dan merupakan pola sikap ataupun respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman dan kekayaan alam serta kebudayaan yang dimanifestasikan sebagai falsafah dan diakomodasikan dalam konstitusi”.[[28]](#footnote-28)**

Politik Luar Negeri pada hakikatnya juga merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu negara dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional dan harus sesuai dengan tujuan nasional beserta sasarannya.

**Mochtar Kusumaatmadja** berpendapat, bahwa “Politik Luar Negeri pada hakikatnya adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenannya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta jangka pendek dan jangka panjang”**.[[29]](#footnote-29)**

Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The Internasional Relations,* yaitu *“Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest”****.*[[30]](#footnote-30)**

Dalam berbangsa dan bernegara atau berbicara mengenai kedaulatan sebuah negara, maka akan membutuhkan diplomasi yang mencakup sarana dan mekanisme dalam menetapkan tujuan dan kepentingan suatu negara. Jack C. Plano dan Roy Olton menerangkan diplomasi, sebagai berikut: “Praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijakan luar negeri serta pelaksanaannya”**.[[31]](#footnote-31)**

Terbentuknya kerjasama IJEPA ini tidak terlepas dari sejarah diplomasi antara Indonesia dan Jepang dimana awal mulanya dimana Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Jepang pada tahun 1958 Jepang dan Indonesia memulai hubungan hubungan diplomatik bilateral secara resmi untuk memperbaiki hubungan diplomatic antar kedua negara. S.L Roy dalam buku *Diplomacy* mempunyai definisi tentang diplomasi yang diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut :

**“Diplomasi yang sangat erat hubungannya dengan hubungan antar Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan Negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sabagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu Negara dengan cara negosiasi dengan Negara lain. (Roy,1991:15)**

Diplomasi merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan, mewujudkan nilai atau menetapkan kepentingan terhadap negara yang tindakan dan perilakunya hendak ditangkal, diubah atau diperkuat. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun matang oleh suatu negara, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun pengertian kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Koesnadi Kertasasmita dalam bukunya *Organisasi Internasional,* yaitu **“Kerjasama Internasional terjadi karena *nation understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negar-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik”.[[32]](#footnote-32)**

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral guna mencapai tujuan sosialnya. Sementara itu, dalam menjalankan kerjasama antara negara yang satu dengan negara lainnya harus dilandasi dengan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain seperti halnya pada kerjasama Indonesia dengan Jepang.

Seperti yang digambarkan oleh Didi Krisna dalam *Kamus Politik Internasional* mengatakan, bahwa “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua belah pihak”**.[[33]](#footnote-33)**

Kerjasama bilateral yang dikoordinasikan oleh Bagian Kerjasama Bilateral, lazimnya dapat dilaksanakan antara Indonesia dan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan atau *Agreement* yang akan menjadi patokan atas semua bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama dalam bidang perindutrian, ekonomi dan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia dan *capacity building,* dan bidang lainnya yang akan disepakati bersama oleh para pihak dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU ( *Memorandum of Understanding* ).

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian memberikan penjelasaan tentang munculnya istilah “perjanjian internasional” sebagai berikut : “**Yang dimaksud dengan perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan nasional”.[[34]](#footnote-34)**

Berikut adalah teori perjanjian internasional menurut **Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja: “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu”.[[35]](#footnote-35)**

Selanjutnya, dari perjanjian internasional tersebut kepentingan nasional berguna agar sasaran suatu negara tercapai dan sesuai dengan tujuannya. Dalam dunia hal ini suatu Negara berhak dan wajib membangun Negara demi kepentingan nasionalnya. Adapun pengertian Kepentingan Nasional menurut **Sutri Yusup** dalam bukunya *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri,* Sebagai berikut :

**“Kepentingan nasional mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi usaha kita untuk mencapai apa yang kita idamkan, dan untuk itu perlu disusun strategi yang dirumuskan pangkalan dan sasaran serta gagasan gerak dari pangkalan menuju sasaran ini dapat dibagi ke dalam sasaran jangka panjang, jangka menengah dan sasaran jangka pendek”.**

Sedangkan pengertian Kepentingan nasional meurut **Mohtar Mas’oed** dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional* **:[[36]](#footnote-36)**

**“Kepentingan nasional setiap Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lainnya. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Kekuasaan dan kepentingan dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan politik internasional”.**

Jadi, suatu Negara yang selalu memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi apapun akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan tujuannya dari pada merubah kepentingannya.

Maka **kepentingan nasional Indonesia** dalam hal ini adalah **:[[37]](#footnote-37)**

**“sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.**

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut maka ekonomi politik internasional sangat berperan, sebagaimana pandangan Mochtar Mas’oed memberikan definisi mengenai ekonomi politik internasional, yaitu **“Ekonomi politik internasional sebagai studi saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat”.[[38]](#footnote-38)**

Kerjasama antar Negara terjalin dalam berbagai macam bidang dan salah satunya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam hal internasional karena menyangkut perekonomian antar 2 negara atau lebih untuk mengadakan kerjasama ekonomi internasional. Adapun definisi ekonomi internasional menurut **Boediono** dalam bukunya yang berjudul **ekonomi internasional,** adalah :

**“Masalah –masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara yang lain. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil atau output Negara satu dengan yang Negara lain, hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi, hubungan ekonomi bisa berbentuk hubungan kriditnya”.[[39]](#footnote-39)**

INDONESIA

Dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar negara, bangsa maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Adapun tujuan dari ekonomi internasional seperti yang dikemukakan oleh **Dominic Salvatore** dalam bukunya *Ekonomi Internasional,* yaitu “ Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu-membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan di dalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain”**.[[40]](#footnote-40)**

Dalam pelaksanaan ekonomi internasional harus ada pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional. Carla Poli dalam *Pengantar Ilmu Ekonomi* berpendapat tentang pertumbuhan ekonomi sebagai berikut : **“Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu. Suatu perekonomian tumbuh, apabila dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 10, 20, atau 50 tahun bahkan lebih lama lagi mengalami kenaikan pendapatan perkapita”. (1997:320)**

Menurut **Sumitro Djodjohadikusumo** dalam bukunya *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* mengatakan bahwa : **“Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri tergantung dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang mendukung pertambahan pendapatan nasional”. (1994:1)**

Data pendapatan per kapita dari berbagai negara pada suatu tahun tertentu, dan perubahannya dalam jangka waktu tertentu, sangat berguna dalam analisa pembangunan. Menurut **Boediono** dalam bukunya : *Teori Pertumbuhan Ekonomi,* mengatakan bahwa :

**“Jadi, perhatian utamanya adalah produktivitas negara tersebut tiap tahunnya, yang diukur dari tingginya *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita masyarakatnya menunjukkan kecenderungan untuk naik dalam jangka panjang”. (1982:9)**

Untuk mengetahui kriteria Negara berkembang, perlu dilihat indicator pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di negara tersebut. Menurut pendapat T. May Rudi tentang tolak ukur Negara berkembang dalam bukunya *Masalah Negara Berkembang* sebagai berikut **:[[41]](#footnote-41)**

**“Biasanya Kriteria utamanya adalah :**

1. **GNP perkapita (Pendapatan Nasional Kotor, dihitung jatah perkepala / per orang) sampai batas tertentu. Hal ini dapat berubah tiap tahun menurut perkembangan ekonomi dunia dan tingkat harga tertentu.**
2. **Andil industri (Manufaktur). Ini biasanya sampai batas dibawah 0% dari GNP untuk *Least Development Counters (LDCS),* atau berkisar sampai 20% untuk *Development Countries.***
3. **Tingkat pengangguran total. Batasnya kira-kira lebih dari 25% angkatan kerja yang ada.**
4. **Tingkat melek hurup yang masih dibawah 80% penduduk yang berumur 15 tahun ke atas atau yang buta huruf masih diatas 20%**
5. **Persentase urbanisasi diatas 3% setiap tahun**
6. **Tingkat pendidikan yang tercapai sebagian besar penduduk masih rendah.**
7. **Angka kematian bayi masih tinggi”.**

Adapun konsep pembangunan ekonomi aktif menurut **Sumitro Djodjohadi** dalam synopsis *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* dinyatakan sebagai berikut :

**“Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan (transisi) dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju tingkat ekonomi yang lebih maju. Ditandai oleh adanya pergeseran dari kegiatan di sektor produksi primer (sumber daya alam) ke sektor produksi sekunder (Industri manufaktur konstruksi) dan sektor tersier (jasa-jasa)”. (1993:21)**

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan atau pertumbuhan suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Industrialisasi sendiri menurut Edi Suwandi Hamid dalam bukunya Industrialisasi mengatakan bahwa industrialisasi adalah:

**“Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang di imbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar”.[[42]](#footnote-42)**

Sementara itu berkaitan dengan industrialisasi, **Halen Hughes** dalam bukunya *Achievement and Objectivesof Industrialization,* yang dikutip dalam *John Cody, “Policies for Industrial in Developing Countries”,* melihat bahwa :

**“Proses Industrialisasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi (economic growth and efisiency). Pemerataan dan kesejahteraan (euits and welfare). Dengan demikian terlihat bahwa tujuan dari proses industrialisasi tidak saja bersifat ekonomi, akan tetapi juga memiliki sifat politik yakni meningkatkan kemandirian nasional dengan melepaskan ketergantungan dari negara-negara lain”. (1980:11)**

Negara-negara yang lemah dalam kekayaan relatifnya, namun kuat dalam daya saingnya, membutuhkan gerakan-gerakan strategis yang akan memperbaiki posisi kekayaannya. Menurut **Alan. B Mountjoy** dalam bukunya *Industrialisasi dan Negara-Negara Dunia Ketiga,* mengemukakan bahwa :

**“Pilihan strategi industrialisasi banyak diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang khususnya untuk mengembangkan industri manufaktur karena pertama, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat pendapatan bersih per kapita nasional dan ketiga , untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran”. (1985:62)**

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan IJEPA dalam bidang Industri ialah melakukan strategi industrialisasinya adalah *industrial policy* (kebijakan industri). **Chalmers Johnson** dalam bukunya : *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy,* yang dikutip o;leh **Bob Sugeng Hadiwanata** dalam bukunya *Politik Bisnis Internasional* mendefinisikan bahwa : **“Kebijakan industri sebagai seperangkat kebijakan ekonomi yang khusus diarahkan pada hal-hal seperti : proteksi industri dalam negeri, pengembangan industri-industri strategis (besi, baja, petrokimia,semen dll), dan perubahan struktur perekonomian nasional untuk mengantisipasi tekanan-tekanan internal maupun eksternal”. (2002:82).**

Perlu juga diperhatikan mengenai definisi Neoliberalisme yang menjadi point penting dalam ekonomi internasional ini. Adapun penjelasan mengenai Pengertian**“Neoliberalisme adalah sistem  perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada  setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah hanya menjalankan fungsi deregulasi bagi mekanisme pasar dan hanya untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan”.[[43]](#footnote-43)**

Dalam hal ini tak lepas dari adanya *Free Trade Area* (FTA) atau perdagangan bebas di antara negara-negara yang ingin memajukan perekonomiannya. Sementara itu berkaitan dengan *Free Trade Area*adapun pengertiannya yaitu, “*Free Trade Agreement* (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; Japan dengan Indonesia; maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA) dan Uni Eropa”**.[[44]](#footnote-44)**

*Free Trade Area*(FTA), wilayah perdagangan bebas dua atau lebih negara yang setuju untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dalam lingkungan wilayah mereka dan di antara mereka sendiri, namun masing-masing negara tetap mempertahankan tarif impornya sendiri terhadap barang impor dari negara di luar wilayah perdagangan bebas tersebut.

Adapun prinsip dasar ***Free Trade Area* (FTA)** atau perundingan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* adalah :

* Bersifat *single undertaking* (*nothing is agreed until everything is agreed*)
* Liberalisasi harus konsisten dengan pasal XXIV GATT
* Berdasarkan line by line
* Negosiasi akses pasar dilakukan secara bersamaan dengan ROO
* *Initial reuest and offer* mencakup seluruh *tarif line*
* *Request* didasarkan pada klasifikasi tarrif mitra
* *Base rate* untuk Jepang 1 April 2005, sedangkan Indonesia menunggu selesainya proses harmonisasi tahap II, dan
* Kategori penurunan/penghapusan *tarrif* bersifat linear**.[[45]](#footnote-45)**

Berdasarkan hal tersebut penulis perlu mengemukakan inti dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis melihat bagaimana upaya dari setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya salah satunya dengan melakukan kerjasama internasional. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Jepang dalam bidang industri melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. IJEPA adalah:

**“IJEPA adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang. IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe”.[[46]](#footnote-46)**

Dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara tentu negara tersebut pasti membutuhkan bantuan negara lain untuk saling mendukung satu sama lainnya, yakni dengan melakukan sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Jepang mengantarkan kita dalam upaya membentuk kerjasama ekonomi dalam pertumbuhan industri dalam negeri melalui *Economic Partnership Aggreement* (EPA) dengan Jepang.

Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis diatas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam konteks *Ekonomic Partnership Agreement* (EPA) di bidang Perindustrian, maka penulis membuat beberapa asumsi, sebagai berikut :

1. Dengan dilakukannya kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA) antara Indonesia dan Jepang maka akan dapat memenuhi kepentingan nasional kedua negara.
2. Kerjasama IJEPA merupakan kepentingan Jepang dalam mendorong liberalisasi pasar di Indonesia.
3. Kondisi perindustrian Indonesia saat ini memang membutuhkan pengembangan yang sesuai apa yang diharapkan khususnya memasuki persaingan pasar bebas bagi warga Negara Indonesia maupun warga Negara Dunia.
4. Dengan disepakatinya perjanjian kerjasama dalam bidang industri salah satunya ada liberalisasi pasar yaitu adanya penurunan bea masuk tariff yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

**2. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut :

**“Dengan di implementasikannya program-program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam Ekonomic Partnership Agreement (IJ-EPA) di bidang Perindustrian sesuai dengan kepentingan bersama, maka implikasinya terhadap perindustrian di Indonesia dapat menguntungkan dan bermanfaat serta pertumbuhannya terus meningkat.”**

**3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk membantu dalam menganalisis peneitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi Operasionalisasi Variabel tentang konsep hipotesis diatas, yaitu :

**Tabel 1.1**

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  (Konsep Teoritik) | **Indikator**  (Empirik) | Verifikasi |
| Variabel Bebas :  Karena *Free Trade Area* (Perdagangan Bebas) mengharuskan setiap negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, maka Indonesia sebagai negara berkembang melakukan perjanjian kerjasama dengan Jepang sebagai negara maju melalui IJEPA | 1. Adanya persetujuan kerjasama Ekonomi (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang di Bidang Perindustrian dalam konteks *Economic Partnership Agreement* (EPA). 2. Program-program IJEPA antara lain : 3. Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) 4. User Specific Duty Free Scheme (USDFS) 5. Sektor Penggerak(*Driver Activities*) 6. Program Kesejahteraan (*Prosperity Program*) | 1. Ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang pada tanggal 20-08-2007 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe   http://kemenlu.go.id   1. *Manufacturing Industrial Development Center* (MIDEC) merupakan sebuah program bantuan teknis dari Jepang untuk *Capacity Building* di bidang Industri yang meliputi otomotif, welding, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, baja, *export & import promotion, dan Small and Meduim Enterprise*.   http://www.kemenperin.go.id |
| Variabel Terikat :  Implikasinya terhadap pertumbuhan industri di Indonesia | 1. Adanya peningkatan hubungan antara Indonesia-Jepang 2. Peningkatan Jepang di Indonesia 3. Peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia dalam sektor Industri | Adanya data dan fakta mengenai peningkatan Industri Jepang di Indonesia juga peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia dalam sektor Industri.  http://www.kemenperin.go.id/artikel/5804/Kebijakan-IJ-EPA-Dievaluasi |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Alur Pemikiran Kerjasama Ekonomi *Indonesia-Japan Ekonomic Partnership Agreement* (IJEPA) dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia**

KEPENTINGAN NASIONAL JEPANG

JEPANG

INDONESIA

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

KERJASAMA BILATERAL

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan kerangka teoritis dan batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)

INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN

INDUSTRI DI INDONESIA

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Teoritis**

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilih dan memilah masalah kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy of composition dan ecological fallacy.* Ada tiga tingkat analisis yang umum digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu : individu dan kelompok, Negara-bangsa, dan sistem regional dan global.

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi, ada 3 unit yang bisa dilihat :

1. Analisa reduksionis, yaitu unit eksplanasi pada tingkat yang lebih rendah
2. Unit korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkat yang sama
3. Analisa induksionis, yang unit analisisnya pada tingkat yang lebih tinggi.

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu **analisa korelasionis** dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama, dimana kerjasama Indonesia dengan Jepang analisanya ditingkat yang sama yaitu untuk meningkatkan potensi kerjasama dalam bidang Industri.

**2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kajian secara sistematik, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan berdasarkan hasil pengamatan terhadap fakta dan fenomena juga masalah aktual yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklarifikasian, sehingga dapat dipahami.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kegiatan penilitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan penelahaan/penelusuran literatur. Pada penelitian ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel, *online research* di internet dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi pada peneliti ini.

**F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan dan instansi dengan tujuan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat untuk skripsi ini, yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261

1. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta10110

1. Perpustakaan Universitas Brawijaya

Jl. Mt. Haryono, Kota Malang, Jawa Timur 65145

1. Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km.21. Jatinangor, Jawa Barat 45363

1. Centre For Strategic International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160

**2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan atau satu semester terhitung pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 dimulai dari persiapan judul proposal penelitian dan pengolahan data. Untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut :

1. **Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang tersandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang mendeskripsikan bagaimana ini dilakukan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, tingkat analisis, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan tabel lamanya penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II Objek Penilitian Variabel Bebas**

Bab ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu, konsep yang menjelaskan dan memprediksi permasalahan tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kerjasama Ekonomi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam cangkupan IJEPA di bidang industri.

**BAB III Objek Penelitian Variabel Terikat**

Bab ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan peristiwanya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah pertumbuhan dalam bidang industri yang berlaku di Indonesia dan disini juga akan dibahas tentang gambaran umum mengenai kondisi perkembangan serta pertumbuhan perindustrian di Indonesia.

**BAB IV Verifikasi Data**

Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang telah dideskripsikan dalam pengolahan data.

**BAB V Kesimpulan**

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bab bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

1. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 266. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. hlm.227 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. hlm. 228 [↑](#footnote-ref-3)
4. Josep M Grieco and John Ikenberry, State Power and World Markets, The International Political Economy. New York and London, 2003. hlm. 224-225 [↑](#footnote-ref-4)
5. JETRO, “Bagaimana Menikmati Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA”, dalam http://www.jetro.go.jp/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf, diakses 25 Desember 2015, Pukul 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Widiana Puspitasari, “Peranan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dalam Mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara (studi kasus: proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTPB) sarulla di sumatera Utara)”,dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl-widianapus-19694-9-11.babi-i.pdf, diakses 25 Desember 2015, Pukul 20.50 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Samsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto : Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia,* Jakarta: Pelangi Cendikia dan Japan Foundation, 2005, hlm.181. [↑](#footnote-ref-7)
8. Direktorat kerjasama Bilateral I Departemen perdagangan Indonesia, *Buku Agenda Perdagangan Indonesia,* 2007, hlm.30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Investasi Jepang yang ada di Indonesia banyak di fokuskan pada industri-industri tekstil dan baja, Ibid, hlm.185. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dilihat dari Hubungan Indonesia-Jepang Onko Chisin, *Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang,* Jakarta 25 Juli 2006, hlm.6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasbi Maulana, *Bagai Pisau Bermata Dua: mengintip Sebagian Konsekuensi Kesepakatan Indonesia-Jepang,* Kontan. No. 9 Tahun XI, 4 Desember 2006. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting,* 24 Juni 2003, seperti dalam http://www.mofa.go.jp/english/mf\_review/361\_03.html, diakses pada tanggal 03 Januari 2016 pukul 20.20 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Joint Announcement by the prime Minister of Japan and the President of the republic Indonesia on the possibilityof the economic partnership agreement between Japan and Indonesia,* 27 Juni 2003, seperti dalam http://www.mofa.go.jp/English/mf\_review/361\_03.html, diakses pada tanggal 03 Januari 2016, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Realisasi konkrit dalam upaya pembahasan negosiasi baru dilakukan dua tahun kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *The Preparatory Meeting on Japan-Indonesia Economic Partnership,* seperti dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/meet0309.html, diakses pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 23.50 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. “Indonesia Stays to Committed to FTA with Japan”, The Japan times, 7 November 2004, seperti dalam http://www.bilaterals.org/articlephp3?id\_article=942, diakses pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 23.55 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Chia Shiow Yue, *East Asian Regionalism and ASEAN-Japan Economic Partnersgip Aggrement,* dalam Narongchai Akrasanee (ed), *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asia Community,* (Tokyo, Japan Center for Internasional Exchange, 2003), h.86. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rendi A. Witular, Japan, RI plan new investment, tread deal, The Jakarta Post 16 Desember 2004. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zakki P. Hakim, *RI, Japan FTA to Boost ASAN-Japan Liberalization,* The Jakarta Post 2 Februari 2005. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dokumen Resmi Departemen Perdagangan, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia – Jepang, h.1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dalam <http://www.tarif.depkeu.go.id/Tarif/Eng/ijepa/?menu=catatan>, diakses 9 Januari 2016, Pukul 22.50 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) hlm 36. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mochtar Mas’oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-24)
25. K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analitis,* terjamahan Wawan Juanda (Bina Cipta, Bandung, 192), hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wikipedia Pengertian Kerjasama Diakses 20 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto, sosiologi: suatu pengantar, CV.Rajawali,Jakarta,1990.hlm 61. [↑](#footnote-ref-27)
28. AA Banyu Perwita, Y.M Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.3-4. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa Ini* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-29)
30. J.C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary* Western Michigan University (New York: Holt Rinehart Winston Inc, 1973), hlm. 127. [↑](#footnote-ref-30)
31. J.C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta: Gramedia,1983), hlm. 201 [↑](#footnote-ref-31)
32. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional* (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm 14. [↑](#footnote-ref-32)
33. Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm 18. [↑](#footnote-ref-33)
34. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional [↑](#footnote-ref-34)
35. Muchtar Kusumatmaja, *Perjanjian Internasional,* PT. Alumni, Bandung, 2003. hlm.10 [↑](#footnote-ref-35)
36. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta : Karya Pustaka, 1990), hlm 163. [↑](#footnote-ref-36)
37. http://ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=31. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mochtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 2. [↑](#footnote-ref-38)
39. Boediono, *Ekonomi Internasional,* 1981*.* hlm.3 [↑](#footnote-ref-39)
40. Dominic Salvatore, *Internasional Economic* (Cambridge: Cambridge University, 1984), hlm.1. [↑](#footnote-ref-40)
41. T. May Rudi, *Masalah Negara Berkembang* (Bandung : Angkasa, 1993), hlm 2. [↑](#footnote-ref-41)
42. Edi Suwadi Hamid, Indutrialisasi (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hlm. 190 [↑](#footnote-ref-42)
43. (Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta, Resist Book, 2005, hlm. 67) [↑](#footnote-ref-43)
44. <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/free-trade-agreement-fta-dan-economic-partnership-agreement-epa-dan-pengaruhnya-terhadap-arus> diakses pada tanggal 17 Maret 2016 Pukul 13.45 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Op. Cit [↑](#footnote-ref-45)
46. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dalam <http://www.tarif.depkeu.go.id/Tarif/Eng/ijepa/?menu=catatan>, diakses 9 Januari 2016, Pukul 22.50 WIB. [↑](#footnote-ref-46)